

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan selalu berhadapan dengan persaingan yang keras untuk dapat terus eksis dalam hal perdagangan dunia, dan khususnya untuk perusahaan *Real Estate and Property*, kompetisi ini berjalan dengan sangat ketat khususnya di Indonesia. Dalam rangka untuk mempunyai potensi yang kuat dalam bersaing, perusahaan juga harus mampu dalam mengelola keuangannya dengan baik, artinya kebijakan pengelolaan keuangan harus dapat menjamin keberlangsungan usaha perusahaan. Manajemen perusahaan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas atau dalam kata lain dapat dipertanggung jawabkan (Baraja, dkk., 2019).

Dalam beberapa tahun terakhir tingkat persaingan bisnis perusahaan *property dan real estate* merupakan subsektor dari perusahaan jasa yang akhir-akhir ini sangat menarik karena merupakan investasi jangka panjang. Potensi yang dimiliki sektor ini cukup besar karena meningkatnya kebutuhan akan rumah setiap tahunnya. Dikutip dari wartakotalive.com bahwa pertumbuhan properti di tahun 2019 akan meningkat karena adanya pengembangan infrastruktur. Kepala Bidang Primer Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengatakan bahwa sektor konstruksi dan *real estate* diperkirakan tetap tumbuh dan stabil berdasarkan progress investasi bangunan, penyediaan infrastruktur dan program-program perumahan rakyat. Dalam meraih pangsa pasar yang lebih luas tidak hanya diperlukan produk yang bagus dan promosi yang menarik tapi juga melihat pada kinerja keuangan yang dimiliki masing-masing perusahaan.

Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan sangat menggambarkan sehat atau tidaknya sebuah keuangan perusahaan berjalan. Sebagai sebuah perusahaan yang bekerja secara profesional pasti memiliki pengelolaan keuangan yang baik, yang mana pengelolaan keuangan tersebut tercatat di dalam laporan keuangan. Dalam PSAK No. 01 (revisi 2009) paragraf 7 menjelaskan tentang penyajian Laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran dan cerminan dari bagaimana keuangan sebuah perusahaan tersebut berjalan dan berfungsi untuk memberikan informasi kepada pihak yang berada di luar lingkup perusahaan dengan pendekatan atau basis akrual. Dalam menyusun Laporan Keuangan sering menggunakan basis akrual karena dapat menggambarkan keadaan keuangan secara riil. Laporan keuangan disiapkan sebagai pertanggungjawaban manajemen kepada investor atau yang biasa disebut sebagai pemodal sehingga dapat menciptakan rasa percaya yang membuat pemodal merasa aman dengan modal yang ditanamkan pada perusahaan tersebut.

Manajemen merupakan tokoh utama dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam PSAK 46 menyatakan bahwa manajemen diberikan kebebasan menentukan pilihan kebijakan akuntansi dalam menentukan besaran pencadangan beban atau penghasilan pajak tangguhan atas adanya perbedaan standar akuntansi dengan peraturan perpajakan. Sebuah unsur kebebasan ini yang terkadang di salah gunakan pembuat laporan keuangan dan membuat asumsi investor seakan baik-baik saja.

Penyusunan laporan keuangan yang dilakukan manajemen dapat dijadikan parameter untuk mengukur kinerja perusahaan dengan melihat informasi mengenai laba atau keuntungan. Informasi mengenai laba merupakan unsur penting yang

digunakan oleh para pengguna laporan keuangan baik pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal seperti pemodal dalam hal pengambilan keputusan. Informasi laba haruslah menggambarkan keadaan ekonomi dan keuangan perusahaan yang sebenarnya, tetapi pada kenyataannya laporan keuangan justru seringkali dimanipulasi oleh pihak manajemen dengan menaikkan laba untuk memaksimalkan keuntungan serta kepuasan pada diri mereka sendiri.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan di Indonesia akan selalu berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Peraturan Perpajakan. Perhitungan akuntansi komersial dapat dikatakan secara global pasti mengacu pada aturan-aturan standar yang ditetapkan dalam PSAK, namun disisi lain untuk menjalankan fungsi *budgeter* dan *reguler* pajak, pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak) menetapkan beberapa pedoman yang khusus dan yang pasti berbeda dengan pedoman akuntansi dalam PSAK. Perbedaan tersebut mewajibkan manajer dalam membuat laporan keuangan, laporan laba rugi komersial berdasarkan PSAK, dan laporan laba rugi fiskal berdasarkan Peraturan Perpajakan (Baraja, dkk., 2019).

Dilandasi dengan semakin naiknya perkembangan pajak di Indonesia dapat dirasakan bahwa pajak menjadi suatu kebutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbanding terbalik dengan kesadaran Wajib Pajak (yang selanjutnya akan disebut WP) yang menurun lalu menganggap pajak bukan sebuah kewajiban. Pajak justru dianggap sebagai beban yang dibayarkan kepada negara dan identik disebut dengan penjajahan. Efek yang dapat dirasakan rasio pembayaran pajak (*tax ratio*) Indonesia semakin minim. *Tax ratio* Indonesia berada di kisaran 10,7 persen

pada 2019 (sumber : CNN Indonesia, 3 desember 2020). Hal ini yang mendasari perusahaan yang juga merupakan WP lebih berorientasi pada laba karena pajak yang ditanggung perusahaan merupakan biaya mengurai laba, semakin tinggi pajak yang ditanggung perusahaan, artinya semakin sedikit laba yang akan diperoleh sehingga muncul keinginan untuk cenderung meminimalkan pembayaran pajak.

Pemerintah memberikan kebebasan kepada wajib pajak dan memperbolehkan wajib pajak mengatur pajaknya sendiri dan dilakukan dengan tujuan baik dibawah pengawasan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perencanaan pajak berkaitan dengan pelaporan laba perusahaan dikarenakan laba yang besar akan menimbulkan beban pajak perusahaan yang juga besar. Perencanaan pajak (*tax planning*) juga dapat diartikan usaha wajib pajak untuk mengatur pajaknya dengan tujuan akhir perencanaan ini menyebabkan utang pajak yang minim, baik Pph maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin, selama hal ini tidak melanggar dan masih di dalam koridor peraturan perpajakan yang berlaku. Sebab itu, perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan tindakan yang legal karena pada dasarnya perpajakan di Indonesia menggunakan sistem *self assessment*. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dapat menggunakan teknik manajemen laba agar mencapai target laba. Berbagai tindakan dilakukan oleh perusahaan untuk merencanakan pajaknya dengan memanipulasi aktivitas operasi perusahaan (*real earning management*) (Putra, 2019).

Pada tahun 1999 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 yang mengatur tentang akuntansi pajak penghasilan yang diberlakukan wajib untuk pelaporan keuangan yang dimulai atau

sesudah 1 Januari tahun 2001. Sebelum PSAK No. 46 diberlakukan, praktik pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan berpedoman pada PSAK No. 16 paragraf 77. PSAK No. 46 diterbitkan untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan yang berkaitan dengan akuntansi pajak penghasilan. Namun dalam PSAK tersebut terdapat beberapa paragraf pernyataan yang dapat memberikan kebebasan manajemen dalam menentukan pilihan kebijakan akuntansi dalam menentukan besaran pencadangan beban/penghasilan pajak tangguhan atas adanya perbedaan antara standar akuntansi dengan perataran perpajakan. Implikasi PSAK No. 46 yang dikaitkannya dengan isu manajemen laba sebagaimana dijelaskan dalam *positive accounting theory* belum banyak diuji secara empiris di Indonesia.

Penelitian (Miller dan Skinner 1998; Petree dkk. 1995 sebagaimana dikutip Bauman dkk. 2001; Burgstahler dkk. 2002; serta Schrand dan Wong 2003) menyatakan bahwa variabel cadangan aktiva pajak tangguhan lebih dapat dimanfaatkan untuk merekayasa laba daripada beban pajak tangguhan. Menurut Jiwanggono,(2014) dalam aset pajak tangguhan terbentuk karena adanya fakta perbedaan waktu tentang pemulihan Pph pada masa mendatang yang mengakibatkan pembayaran pajak periode mendatang menjadi lebih kecil atau besar. Dipicu juga dengan adanya perbedaan temporer yaitu penyesuain suatu perilaku dalam perpajakan menurut akuntansi dan ketentuan perpajakan.

Adanya selisih perhitungan antara laba akuntansi dan laba fiskal dapat menimbulkan problem dalam menentukan besarnya laba, dapat mempengaruhi posisi laporan keuangan dengan pembuktian tidak balancenya jurnal saldo di akhir. Sehingga, perlu dilakukannya rekonsiliasi fiskal yaitu untuk dilakukannya penyesuain

jumlah saldo antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Perbedaan temporer juga dapat menghasilkan beban pajak tangguhan.

Beberapa fenomena manajemen laba yang menarik akhir-akhir ini adalah salah satu perusahaan jasa yaitu Garuda Indonesia yang melakukan manipulasi laporan keuangan tahun 2018. Masalah ini akhirnya diketahui publik pada april 2019 karena tidak hanya mampu menutupi kerugian tahun sebelumnya, tetapi juga menghasilkan laba bersih sebesar Rp.11,33 miliar atau US\$ 809,84 ribu. Untung yang didapatkan perusahaan tersebut merupakan hasil polesan. Kejanggalan pada laporan keuangan ini dimulai dengan perolehan laba bersih tahun 2018 karena adanya perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang bernilai Rp.3,41 triliun. Perusahaan ini seharusnya mengalami kerugian jika tidak ada pencatatan perolehan pemasukan dari perjanjian tersebut.

Perusahaan jasa selanjutnya yang melakukan manipulasi laba adalah PT Waskita Karya yang termasuk subsektor konstruksi bangunan. Laporan keuangan PT Waskita dimanipulasi oleh 3 direksi PT Waskita Karya dan 2 Kantor Akuntan Publik. PT Waskita diketahui memiliki kelebihan laba bersih sebesar Rp 500 miliar. Hal ini diketahui saat dilakukan audit laporan keuangan seiring pergantian direksi pada tahun 2008. Direksi melakukan rekayasa pada laporan keuangan dengan memasukkan pendapatan tahun depan ke pendapatan tahun lalu. Pada akhirnya kementerian BUMN memberhentikan dua direksi PT Waskita Karya.

Beberapa peneliti mencoba mencari faktor-faktor atau determinan apa saja yang dapat digunakan sebagai prediktor manajemen laba. Berikut penelitian terdahulu

yang berkaitan dengan aset pajak tangguhan, dan perencanaan pajak telah banyak dilakukan diantaranya adalah menurut Sibarani, dkk.,(2015) membutuhkan beban pajak tangguhan berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba, Timuriana & Muhamad,(2015) masih sama dengan penelitian sebelumnya beban pajak tangguhan tidak berpengaruh tetapi terdapat indikator tambahan yaitu aset pajak tangguhan yang berpengaruh positif signifikan, sedangkan dalam penelitian Baraja, dkk.,(2019) menemukan bahwa beban pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap praktik perilaku manajemen laba yang dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015,berbeda dengan hasil pembuktian, Sutadipraja, dkk.,(2019) beban pajak tangguhan lagi lagi tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba walaupun demikian aset pajak tangguhan masih memiliki peran yang sama dalam pengaruhnya yaitu positif signifikan. Dengan adanya hasil yang belum mencapai titik keseragaman, hal ini memicu keinginan peneliti untuk meneliti kembali. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul “KEMAMPUAN PERENCANAAN PAJAK DAN ASET PAJAK TANGGUHAN DALAM DETEKSI MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN *REAL ESTATE AND PROPERTY* TAHUN 2017-2019”

1.2 Rumusan Masalah

Banyak faktor yang memungkinkan terjadinya manajemen laba, yang dalam penelitian ini peneliti ingin menguji variabel perencanaan pajak dan aset pajak tangguhan. Secara lebih rinci perumusan masalah ini di buat dalam dua pertanyaan berikut:

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba?
2. Apakah aset pajak tangguhan berpengaruh praktik terhadap manajemen laba?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian yang diuraikan sebelumnya maka maksud melakukan penelitian ini adalah untuk sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh perencanaan pajak terhadap praktik manajemen laba?
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh aset pajak tangguhan terhadap praktik manajemen laba?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para peneliti khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan, penelitian ini dapat memberikan bukti empiris dalam mendapatkan proksi yang lebih baik atau metode untuk mengevaluasi penilaian pajak tangguhan.

2. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan, sebagai bahan referensi dan memebrikan sumbangan gagasan untuk penelitian selanjutnya khususnya penelitian yang membahas mengenai manajemen laba, serta dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan literature yang berkaitan dengan bidang akuntansi dan perpajakan.

3. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam menganalisis suatu laporan keuangan perusahaan yang akan melakukan penanaman modal didalamnya agar tidak dalah dalam pengamblan keputusan karena laporan keuangan yang terdapat praktik manajemen laba menurunkan kualitas laba

4. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengamati perilaku perusahaan yang menjalankan praktik manajemen laba yang tidak menggambarkan kondisi laba yang sesungguhnya dan secara langsung berpengaruh terhadap pembayaran pajak yang diberikan untuk pemerintah.